

Dampak Pola Kemitraan Perunggasan terhadap Posisi Tawar Peternak di Kabupaten Bandung (Marina Sulistyati dkk.)

**DAMPAK POLA KEMITRAAN PERUNGGASAN
TERHADAP POSISI TAWAR PETERNAK
DI KABUPATEN BANDUNG**

Marina Sulistyati, Munandar Sulaeman, dan Siti Homzah
Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran
Jatinangor – Sumedang

ABSTRAK. Penelitian ini bertujuan untuk: a) menganalisis pola kemitraan perunggasan peternak ayam ras yang sedang berjalan di Kabupaten Bandung. b) menganalisis dampak pola kemitraan perunggasan terhadap posisi tawar peternak ayam ras di Kabupaten Bandung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif untuk mengidentifikasi pola kemitraan yang ada dan mengkaji kategori-kategori dari data kualitatif. Tujuannya untuk mengungkap secara obyektif tindakan dan makna tindakan. Pendekatan ini berorientasi pada proses dan pencarian tentang makna kasusnya dengan harapan akan memperoleh suatu generalisasi tentang apa yang menjadi dasar terjadinya kasus (Munandar, 2004). Penelitian dilakukan di Kabupaten Bandung yang ditentukan secara *purposive* dengan alasan Kabupaten Bandung merupakan basis kegiatan PIR perunggasan. Analisis dilakukan dengan cara interpretatif, yaitu memahami secara mendalam (*verstehen*) tentang simbol makna yang menjadi latar dari kegiatan usahanya.

Dari hasil analisis diambil simpulan sebagai berikut:

1. Empat pola kemitraan perunggasan yang berlangsung di Kabupaten Bandung tidak secara langsung antara peternak sebagai plasma dengan industri pabrikaan, tetapi dimediasi oleh suatu badan atau perusahaan yang menjembatani antara peternak dengan perusahaan sebagai inti, bahkan badan atau perusahaan tersebut juga merupakan anak perusahaan atau kepanjangan tangan dari perusahaan pabrikaan. Akibatnya nilai ekonomi kontrak kerjasama kemitraan menjadi tidak efisien bagi peternak.
2. Pada umumnya pola kemitraan yang dikembangkan oleh para pengusaha pabrik menimbulkan dampak posisi tawar peternak semakin lemah apabila berhadapan dengan para pengusaha pabrik, hal ini disebabkan sistem perjanjian yang dibangunnya adalah berdasarkan kepentingan dan kemampuan daya kontrol pengusaha besar.

Kata Kunci: Pola kemitraan, perunggasan, posisi tawar

ABSTRACT. This research aims to analyze poultry farmer partnership pattern and its impact of to the farmer bargaining position in the Bandung district. This research uses a case study method with a qualitative approach in identifying the partnership pattern and its category. The research was carried out in the district of Bandung, the center of *PIR Perunggasan*. The analysis was done interpretatively to understand the symbolic meanings which becomes the ground of the business activity.

The conclusion of the research is as follows:

1. Four model partnerships at Bandung district is not direct between farmers as plasma and feeding company as council mediation by another institutional business as nucleus. The effect for the famers contract value of poultry business partnership becomes disefficiency.
2. The poultry partnership pattern, in which the contract system was developed based on the interest and control capacity of the company, causes a low bargaining position of the farmers.

Key Word : Partnership, poultry, bargaining position

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Masyarakat peternak ayam ras pada umumnya berasal dari latar belakang sosial ekonomi yang rendah, selain itu krisis ekonomi yang dialami memberi dampak harga semua sarana produksi peternakan menjadi tinggi sehingga jangkauan peternak untuk mendapatkan sarana produksi tersebut menjadi rendah. Permasalahan peternakan ayam ras meliputi kegiatan dari hulu sampai hilir yang banyak melibatkan pelaku-pelaku agribisnis dalam bentuk kemitraan.

Kemitraan mempertemukan kepentingan antara pihak peternak dan pihak penguasa modal sebagai penyedia sarana produksi, dimana harga ditentukan sepihak oleh penguasa modal sehingga nampak pola kemitraan yang merupakan suatu sistem agribisnis peternakan ini belum sempurna secara utuh sebagai sistem agribisnis. Pada setiap komoditas ternak masih nampak ada celah yang harus diberdayakan. Contoh klasik dalam berbagai komoditas peternakan aspek produksi relatif dapat diatasi, tetapi sarana dan prasarana produksi masih tergantung pada penguasa modal dan teknologi atau sumber daya alami serta pemasaran masih tergantung kepada pengusaha/pemodal lain.

Selain gambaran pola kemitraan yang kurang memihak kepada peternak melalui PIR dan yang lainnya, juga perlu dipertimbangkan tentang potensi peternak unggas pada masyarakat kita. Potensi yang patut dipertimbangkan adalah: *pertama*, tradisi beternak ayam di pedesaan terutama ayam buras, sudah merupakan andalan penunjang kehidupan ekonominya. Fungsi ternak sebagai tabungan nampak cukup kuat menjadi tradisi di masyarakat. *Kedua*, sumberdaya manusia di daerah peternakan cukup memadai, bahkan seandainya

dikembangkan pola kemitraan usahatani ayam yang menguntungkan, dapat merupakan daya tarik tersendiri. Apalagi sekarang pengembangan ayam ras sudah dikenal dan menyebar di pedesaan. *Ketiga* sumberdaya alam seperti lahan dan yang lainnya yang terkait dengan sistem pengadaan pakan, untuk kondisi saat ini masih relatif dapat dipertanggungjawabkan. Petani yang menanam jagung, padi dan sumber lainnya baik secara langsung atau tidak langsung nampak kontribusinya.

Pengalaman masyarakat petani/peternak dalam manajemen agribisnis atau pada lingkup agroindustri sebagai bagian dari agribisnis, berakhir dengan adanya ketidakseimbangan antara minus *value* bagi peternak dan surplus *value* bagi pemodal yang ada dalam jaringan agribisnis. Meminjam pandangan Marx tentang *mode of production* ternyata kelompok inti sebagai *forces of production*, mempunyai nilai berlebih *surplus value* dibandingkan dengan plasma. Melihat kondisi seperti yang dijelaskan sebelumnya, maka dirasakan perlu untuk melihat bagaimana pola kemitraan yang sudah berlangsung saat ini serta melihat bagaimana dampak dari pola kemitraan tersebut terhadap posisi tawar peternak.

Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang tersebut maka dapat diidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pola kemitraan perunggasan peternak ayam ras yang sedang berjalan di Kabupaten Bandung.
2. Bagaimana dampak pola kemitraan perunggasan terhadap posisi tawar peternak ayam ras di Kabupaten Bandung.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah maka tujuan dari penelitian adalah:

1. Menganalisis pola kemitraan perunggasan peternak ayam ras yang sedang berjalan di Kabupaten Bandung.
2. Menganalisis dampak pola kemitraan perunggasan terhadap posisi tawar peternak ayam ras di Kabupaten Bandung.

TINJAUAN TEORI

Kemitraan menurut Undang-undang 1945 pasal 1 ayat 8 tentang usaha kecil dan menurut PP No. 44/1997 adalah "kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan". Pengertian kemitraan sejalan dengan Direktorat Jendral Pembinaan Pengusaha Kecil, Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil (1994) adalah hubungan bisnis antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil disertai

pembinaan berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan akses pemasaran, peningkatan penggunaan teknologi peternakan, peningkatan modal kerja terhadap kredit perbankan.

Kegiatan peternakan merupakan suatu sistem yang melibatkan banyak pihak terkait. Lingkup kegiatan sistem agribisnis menurut Saragih dan Krisnamurti (1992) mencakup sistem a) budidaya (*production*), b) pengadaan sapronak (*input factor*), c) industri pengolahan (*processing*), d) pemasaran (*marketing*) dan e) jasa-jasa kelembagaan (*supporting institution*). Kelima elemen tersebut merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat terpisah, tetapi harus terintegrasi. Demikian pula model *kemitraan peternak unggas* tidak lain adalah jaringan agribisnis yang meliputi kelima lingkup kegiatan mulai dari pengadaan sapronak, budidaya, industri pengolahan, pemasaran dan jasa-jasa kelembagaan. Kegiatan kemitraan peternak unggas lingkup kegiatan tersebut didistribusikan ke beberapa pelaku kegiatan seperti pemodal (pemasok sapronak), peternak bagian budidaya, pedagang bagian pemasaran dan jasa, kelembagaan seperti koperasi atau kelompok.

Mat Sukur (1996) dalam Fitriani (2004) menyatakan bahwa azas dalam kemitraan usaha agribisnis mengacu pada terciptanya suasana keseimbangan, keselarasan dan keterpaduan antara pelaku kemitraan dengan azas operasional sebagai berikut: 1) Dari segi hukum kedudukan antar sesama mitra usaha adalah sama; 2) saling menguntungkan; 3) Saling mempercayai; (4) Saling memerlukan antara pengusaha sebagai pemasok bahan baku dan peternak memerlukan penampungan hasil dan bimbingan; (5) Saling melaksanakan etika bisnis.

Suatu model pemberdayaan jaringan agribisnis seharusnya berbasis pada kelembagaan (sosial budaya) yang berlaku di daerah yang bersangkutan. Hal ini bukan berarti tidak boleh ada perubahan, tetapi prinsip-prinsip dasar nilai sosial budayanya tetap harus dipegang. Contohnya dalam prinsip bagi hasil, konsep *maro* dianggap masyarakat sebagai sistem norma untuk mencapai tujuan atau kegiatan yang oleh masyarakat dipandang penting. Jadi bentuk apapun pola pemberiannya maka bantuan konsep tersebut tetap harus menjadi nilai untuk mempertemukan kebutuhan masyarakat, kalau memang konsep *maro* itu berlaku. Seandainya pola tersebut akan diubah, dalam bentuk modifikasi material lainnya, maka semangat pembagian yang sama tetap harus ada (Horton dan Hunt, 1984).

Gambaran dampak dari kondisi tersebut mengacu dari kondisi peternakan ayam ras pada saat ini, yang dilihat dari beberapa variabel:

Perspektif Kelembagaan

Dari perspektif kelembagaan akan nampak tujuan dan aspirasi peternak yang tidak tercapai.

Sistem Pertukaran

- a. Dampak dari sistem pertukaran adalah tidak memotivasi peternak untuk melakukan banyak transaksi.

- b. Peternak tidak memperoleh kepuasan sosial misalnya dalam hal penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*).

Dampak terhadap analisis usaha

Kondisi ini dilihat dari kegiatan usaha yang tidak memberikan keuntungan kepada peternak.

Karena institusi sebagai wahana saluran aspirasi, kehendak dan sekaligus alat atau instrumen untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia, maka suatu institusi memiliki berbagai komposisi dan fungsi seperti dijabarkan oleh Chitambar (1972) yaitu :

- Material tujuan budaya
- Prasarana partisipasi aktif bagi anggota
- Pedoman bertindak dan berfikir
- Berfungsi merealisasikan kebutuhan dasar
- Mempunyai struktur seperangkat norma dan harapan dan jaringan peran
- Mempunyai fungsi manifes dan laten
- Mempunyai peran besar dalam pengawasan dan individual
- Mempunyai banyak fungsi (amalgamasi)
- Mempunyai beberapa unsur pembentuk komposisi lembaga
- Mempunyai efek fungsi positif dan negatif, sebagai sarana untuk meng-efektifkan kegiatan

Dari sekian banyak unsur kelembagaan maka ada suatu unsur penting yaitu *partisipasi* yang diartikan *mengambil bagian*. Orang yang berpartisipasi artinya orang yang mengambil bagian dalam suatu kegiatan. Uphoff dan Cohen (1977) menguraikan konsep partisipasi menjadi lima tahap yaitu :

- a. Keikutsertaan dalam persiapan
- b. Keikutsertaan dalam perencanaan
- c. Keikutsertaan dalam pelaksanaan kegiatan
- d. Keikutsertaan dalam evaluasi hasil
- e. Keikutsertaan dalam menikmati hasil

Tiga persyaratan untuk tercapainya model partisipatif mandiri adalah:

1. Ada kesesuaian antara fungsi model pemberdayaan dengan keinginan penerima bantuan.
2. Ada kesesuaian antara fungsi material model pemberdayaan dengan penerima bantuan.
3. Ada kesesuaian antara prinsip dasar sosial budaya (mekanisme sosial budaya) model bantuan dengan kerangka aspirasi masyarakat penerima bantuan.

Ketiga unsur tersebut apabila tersedia secara serentak dapat menimbulkan daya sinergis untuk menjadi mandiri.

METODE PENELITIAN

Obyek dalam penelitian ini adalah peternak sebagai *plasma* dan inti yaitu pengusaha sebagai pemasok atau koperasi yang tergabung dalam kegiatan kemitraan usaha ternak unggas ayam ras pedaging di Kabupaten Bandung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif untuk mengidentifikasi pola kemitraan yang ada dan mengkaji kategori-kategori dari data kualitatif. Tujuannya untuk mengungkap secara obyektif tindakan dan makna tindakan. Pendekatan ini berorientasi pada proses dan pencarian tentang makna kasusnya dengan harapan akan memperoleh suatu generalisasi tentang apa yang menjadi dasar terjadinya kasus (Munandar, 2004).

Penentuan daerah penelitian dilakukan secara *purposive*. Artinya dipilih sedemikian rupa sesuai dengan tujuan penelitian yaitu ingin menganalisis pola kemitraan perunggasan yang sedang berjalan serta melihat bagaimana kekuatan dan kelemahannya agar diperoleh *base data* untuk melihat dampak dari pola kemitraan terhadap posisi tawar peternak.

Atas dasar pertimbangan tersebut maka Kabupaten Bandung dipilih sebagai lokasi penelitian berdasarkan pertimbangan ; daerah tersebut merupakan basis 4 *model* pola kemitraan yaitu : (1) Pola Koperasi sebagai Inti; (2) Pola Perseroan Terbatas (PT) sebagai Inti; (3) Pola PT sebagai Inti dan Koperasi sebagai fasilitas kredit ; (4) Pola Perusahaan Sapronek (pabrik) sebagai Inti.

Data diperoleh dengan cara: tahap pertama dilakukan dengan wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan menggunakan pedoman wawancara, sedangkan tahap kedua untuk mengetahui kualitas hasil wawancara tersebut maka dilakukan uji validitas dengan cara *triangulasi* artinya data yang diperoleh dari wawancara tersebut dikonfirmasi dengan berbagai aturan atau berbagai SK tentang PIR perunggasan.

Model analisis pendekatan penelitian dilakukan secara kualitatif yaitu mengkaji kategori-kategori dari data kualitatif. Analisis dilakukan dengan cara interpretatif, yaitu memahami secara mendalam (*verstehen*) tentang simbol makna yang menjadi latar dari kegiatan usahanya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Pola Kemitraan yang Berlangsung di Kabupaten Bandung

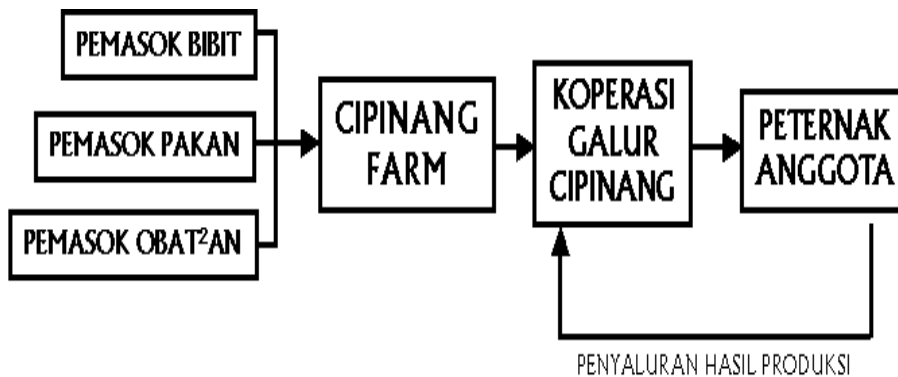
Hasil analisis di lapangan menunjukkan bahwa pola kemitraan yang berlangsung di Kabupaten Bandung ditunjukkan dengan 4 model sebagai berikut :

Pola Kemitraan Koperasi Sebagai Inti (Kasus Koperasi Galur Cipinang)

Pola ini melibatkan empat pelaku kemitraan yaitu :

- Kelompok pemasok/para pemodal/pengusaha besar yang menyediakan sapronak (bibit, pakan, obat-obatan). Bibit berasal dari PT Sinta sedangkan pakan dan obat-obatan dari Comfeed .
- PT Cipinang Farm sebagai mitra dari pemasok yang dipercayai untuk menyalurkan sapronak
- Koperasi Galur Cipinang berperan dalam memberdayakan para anggota koperasi peternak dan sekaligus sebagai lembaga yang memperlancar akses ke bank untuk mendapatkan modal usaha.
- Peternak anggota koperasi sebagai pelaksana kemitraan yang memproduksi hasil usaha ternak unggas yang bermitra dengan koperasi.

Bagan 1. *Pola Kemitraan Koperasi Sebagai Inti*



Mekanisme kerja dari ke empat aktor tersebut memperlihatkan peran dan fungsi dari para pelaku kegiatan kemitraan tersebut . Para peternak yang juga sebagai anggota koperasi diikat sebagai anggota kemitraan yang berfungsi sebagai plasma dan mempunyai kewajiban memanfaatkan paket bantuan tersebut untuk menghasilkan produksi ayam pedaging. Pola kemitraan ini diwujudkan dalam bentuk kesepakatan melalui perjanjian.

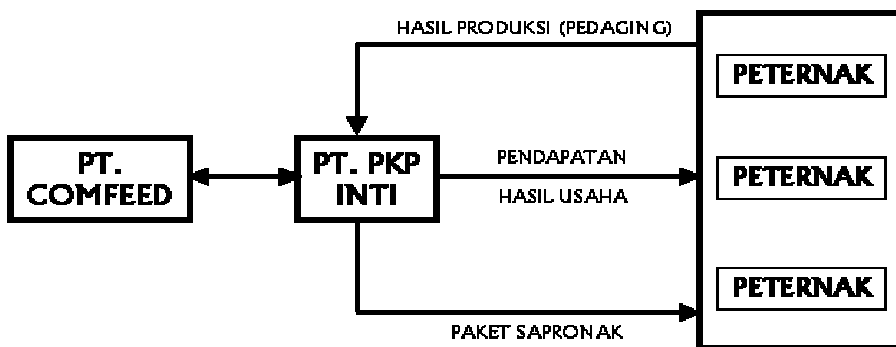
Perjanjian yang ada pada pola kemitraan koperasi sebagai inti kurang sempurna karena tidak mencantumkan kewajiban para anggota untuk memberi anggunan ke koperasi, walaupun dalam kenyataannya agunan tersebut diminta oleh koperasi (berupa BPKB, sertifikat tanah). Hak yang diberikan bagi peternak hanyalah sebatas memperoleh informasi pasar dari koperasi berupa informasi mengenai daerah sumber produksi, penawaran permintaan dan informasi pasar mengenai DOC.

Pola Perseroan Terbatas (PT) sebagai Inti (Kasus di PT Prima Karya Persada)

Pada pola ini pelaku yang terlibat dalam kemitraan meliputi :

- PT Comfeed sebagai pemasok tunggal sarana produksi yang menyalurkan sarana sapronak ke PKP sebagai inti.
- PKP yang merupakan inti dalam pola kemitraan berperan sebagai pengorganisir pola kemitraan yang sifatnya teknis beternak, administrasi dan keuangan. Fungsi lainnya menyalurkan paket kemitraan berupa sapronak dan menampung hasil produksi dari peternak sebagai plasma.
- Peternak sebagai plasma yang memproduksi hasil ternak yang berasal dari paket yang diberikan oleh inti.

Bagan 2. *Pola Perseroan Terbatas (PT) sebagai Inti*



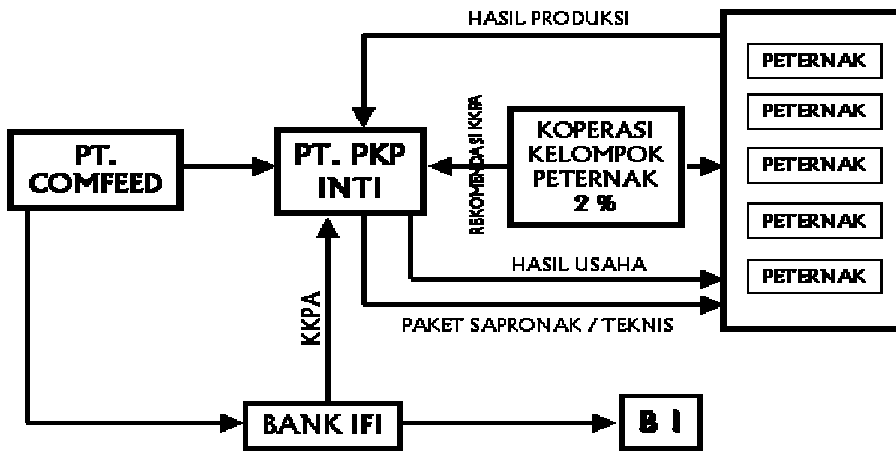
Posisi peternak pada pola ini ditentukan dengan sistem perjanjian yang telah disepakati, diantaranya paket ternak berjumlah 5000 ekor disertai paket sapronak, hasil produksi ditampung PKP, imbalan yang diterima berupa upah Rp 350/ekor (diberikan bertahap: pertama Rp 200 pada saat DOC masuk dan Rp 150 setelah akhir pemeliharaan). Bonus diberikan Rp 50/kg apabila saat panen $FCR = 1,7$.

Pola Perseroan Terbatas (PT) sebagai Inti dan Koperasi sebagai Fasilitas Kredit (Kasus di Mitra Jaya Priangan)

Pada pola ini pelaku kegiatan kemitraan meliputi :

- Kelembagaan PT PKP yang merupakan inti dapat pasokan sapronak dari PT Comfeed.
- Kelembagaan Koperasi Mitra Jaya Priangan (MJP) yang memberikan rekomendasi untuk mendapat modal kredit KKPA (kredit Koperasi Peternak Anggota).
- PT Comfeed adalah penjamin PT PKP.

Bagan 3. Pola Perseroan Terbatas (PT) sebagai Inti dan Koperasi sebagai Fasilitas Kredit



Posisi tawar peternak pada pola ini dapat dikaji dari sistem kemitraannya yaitu peternak menerima paket 5000 ekor DOC, pakan dan obat-obatan. Kewajiban peternak adalah menyediakan kandang, peralatan, tenaga kerja, sekam, listrik, minyak tanah. Peternak mendapat upah tenaga kerja berdasarkan periode pemeliharaan. Posisi tawar peternak dalam pola kemitraan ini dapat dianalisis dari sistem perjanjian kontrak kerja yang menyatakan bahwa :

1. Kredit diberikan dalam bentuk paket berupa 5000 ekor DOC.
2. Peternak sebagai plasma wajib menyerahkan jaminan dalam bentuk sertifikat lahan atau surat berharga lain.
3. Peternak sebagai plasma wajib menyetor cadangan kerja dan tabungan beku sebesar Rp 500/periode.

Pola Perusahaan Sapronak (Pabrikan) sebagai Inti (Kasus pada Vista Grain)

Pelaku dari pola kemitraan ini yaitu :

- a. Perusahaan sapronak Pabrikan sebagai inti yang berfungsi mensuplai sarana produksi dari perusahaan tersebut.
- b. Peternak sebagai plasma wajib memberikan jaminan sertifikat lahan, kemudian peternak mendapat sapronak berdasarkan kontrak kerjasama yang hasil produksinya harus disetorkan ke perusahaan pabrikan.

Bagan 4. Pola Perusahaan Sapronak (Pabrikan) sebagai Inti



Posisi tawar peternak dapat dianalisis dari prinsip kerjasama pola kemitraan dimana didalam prinsip tersebut dinyatakan bahwa usaha yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, tingkat keuntungan yang lebih tinggi adalah nilai tambah bagi peternak, dan inti akan memberi bonus bila bobot hasil panen mencapai FCR standar.

Ketentuan persyaratan yang mempengaruhi posisi tawar peternak yaitu:

- Peternak wajib menyediakan lahan yang dapat dilalui kendaraan dengan air yang cukup serta tersedia listrik dan tarategis letaknya.
- Peternak wajib membangun kandang.
- Peternak memberikan surat jaminan berupa sertifikat, letter c, girik atau kikitir.
- Inti menseleksi dan memberikan standar mengenai perkandangan, memberikan paket 6000 DOC, menentukan harga garansi yang meliputi harga DOC dan sapronak. Harga garansi makin besar, tetapi harga garansi dapat berubah sesuai harga pakan.
- Peternak mendapat bonus dari perhitungan FCR standar (1,7), tetapi jika ayam sakit atau jelek kualitasnya maka harga garansi dipotong sesuai dengan harga ayam (kasus yang terjadi mencapai 30% dari nilai paket).

Dampak Pola Kemitraan terhadap Posisi Tawar Peternak

Dari ke empat pola kemitraan yang berlangsung di Kabupaten Bandung, maka dapat dijelaskan dampak pola kemitraan terhadap posisi tawar sebagai berikut:

Posisi Tawar Peternak pada Pola Kemitraan Koperasi Sebagai Inti (Kasus Koperasi Galur Cipinang)

Pada pola ini nampak posisi tawar peternak anggota koperasi sangat lemah terutama dalam hal keharusan menyediakan agunan, karena dalam perjanjian tersebut secara eksplisit tidak dicantumkan tetapi dalam praktek atau kenyataannya peternak tersebut diharuskan menyediakan agunan. Hal tersebut menunjukkan pola kemitraan tidak memiliki legalitas yang resmi yang disetujui atau merupakan aspirasi bagi para peternak. Akibat selanjutnya pihak inti dengan mudah menentukan nilai atau harga agunan tersebut melalui kekuatan posisi tawarnya.

Posisi tawar yang diperoleh oleh para peternak yaitu informasi pasar yang berkaitan dengan sumber produksi, penawaran dan permintaan dan DOC. Secara prinsip kegiatan usaha ternak anggota kemitraan informasi mengenai sumber produksi tersebut tidak memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan para peternak itu sendiri, sebab dalam praktek penjualan hasil produksi peternak langsung ditangani dan ditentukan oleh hasil transaksi PT Cipinang Farm dengan pembeli yang didasarkan pada kondisi atau usia ternak yang ada di kandang peternak. Dengan demikian posisi tawar peternak dalam hal transaksi jual beli sangat lemah dihadapan inti.

Aspek informasi penawaran dan permintaan yang ada dalam mekanisme pasar meskipun diketahui peternak, dalam transaksi tetap tidak memiliki kewenangan untuk menentukan berapa harga jual yang akan ditawarkan peternak kepada pembeli. Posisi tawar peternak dalam hal penyediaan DOC, tidak diberi peluang untuk mencari baik jenis maupun harga DOC yang sesuai dengan keinginan dan perhitungan untung rugi peternak, karena dalam menentukan pilihan DOC yang harganya terjangkau oleh peternak ditentukan berdasarkan hasil transaksi dan seleksi oleh PT Cipinang Farm. Artinya peternak dalam hal pemilihan DOC tidak memiliki posisi tawar yang berpihak pada peternak sehingga harga jual DOC yang diterima peternak mempengaruhi pendapatan peternak.

Posisi Tawar Peternak pada Pola Perseroan Terbatas (PT) sebagai Inti (Kasus di PT Prima Karya Persada)

Pola pola ini dapat dikatakan peternak hanya sebagai buruh di tempatnya sendiri. Perhitungan untung rugi sudah sedemikian rupa diperhitungkan inti, tidak ada posisi tawar peternak yang memiliki ruang gerak untuk menentukan harga jual sesuai harga pasar misalnya, semuanya sudah dipola dan dipatok pembagiannya. Apalagi harga pasar menguntungkan maka keuntungan adalah hanya diperoleh oleh inti. Walaupun ada bonus, maka bonus yang diperoleh adalah hasil usaha peternak itu sendiri, bukan karena bonus mekanisme pasar. Peternak tidak berhubungan sama sekali dengan mekanisme pasar, artinya posisi tawar peternak dengan mekanisme pasar tertutup.

Posisi Tawar Peternak pada Pola Perseroan Terbatas (PT) sebagai Inti dan Koperasi sebagai fasilitas kredit (Kasus di Mitra Jaya Priangan)

Posisi tawar peternak pada pola ini sangat lemah karena sistem yang dilakukan adalah sistem kredit dalam bentuk paket, sehingga tidak ada kesempatan atau celah bagi peternak untuk melakukan permintaan atau penawaran dari pihak peternak terhadap paket yang diberikan, misalnya jenis DOC sapronak apalagi yang berkaitan dengan masalah transaksi hasil produksi. Bahkan peternak dibebani biaya operasional untuk pakan Rp 15/kg dan untuk DOC Rp 100/ekor. Pengambilan dana tersebut sudah merupakan ketentuan koperasi MJP yang didasarkan atas kepentingan Koperasi MJP sendiri. Beban lain yang menggambarkan lemahnya posisi tawar yaitu peternak harus menerima nilai harga ayam kerdil yang dinilai hanya lima puluh persen dari harga normal, padahal nilai DOCnya sama dengan DOC yang normal. Peternak sebagai anggota koperasi berkewajiban untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Posisi Tawar Peternak pada Pola Perusahaan Sapronak (Pabrik) sebagai Inti (Kasus pada Vista Grain)

Berdasarkan peraturan pola kemitraan tersebut nampak posisi tawar peternak sangat lemah terhadap perusahaan inti baik dalam penyediaan modal maupun dalam menentukan nilai hasil produksi. Peternak dalam hal ini tidak dapat menguasai mekanisme pasar, karena semua harga yang berkaitan dengan bahan baku DOC dan sapronak termasuk hasil produksinya harus mengikuti ketentuan standar yang diberikan oleh inti. Peternak dalam hal ini tidak dapat mengontrol baik kualitas sarana produksi maupun harga pasar hasil produksi. Kondisi demikian jelas merugikan pihak peternak.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Empat pola kemitraan perunggasan yang berlangsung di Kabupaten Bandung tidak secara langsung antara peternak sebagai plasma dengan industri pabrika, tetapi dimediasi oleh suatu badan atau perusahaan yang menjembatani antara peternak dengan perusahaan sebagai inti, bahkan badan atau perusahaan tersebut juga merupakan anak perusahaan atau kepanjangan tangan dari perusahaan pabrika. Akibatnya nilai ekonomi kontrak kerjasama kemitraan menjadi tidak efisien bagi peternak.
2. Pada umumnya pola kemitraan yang dikembangkan oleh para pengusaha pabrika menimbulkan dampak posisi tawar peternak semakin lemah apabila berhadapan dengan para pengusaha pabrika, hal ini disebabkan sistem perjanjian yang dibangunnya adalah berdasarkan kepentingan dan kemampuan daya kontrol pengusaha besar.

Saran

1. Untuk meningkatkan posisi tawar peternak diupayakan pola kemitraan yang dijalankan tanpa badan atau lembaga mediasi, tetapi langsung antara peternak sebagai plasma dengan inti agar diperoleh transaksi yang efisien.
2. Untuk memperoleh posisi tawar yang seimbang antara peternak sebagai plasma dengan perusahaan sebagai inti, maka sistem kontrak kerjasama kemitraannya harus merupakan hasil kesepakatan bersama yang didasarkan kepada kepentingan bersama.
3. Prinsip pola kemitraan haruslah sistem tanggungjawab bersama antara inti dengan plasma, sehingga apabila ada beban resiko yang terjadi menjadi beban kedua belah pihak, bukan hanya menjadi beban peternak saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Chitambar. 1972. Introductory rural sociology. Eastern Private Limited New Delhi.
- Direktorat Jendral Pembinaan Pengusaha Kecil, Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil. 1994. Kemitraan.
- Fitriani, Anita. 2004. Analisis pola kemitraan antara peternak Ayam ras pedaging dengan *poultry shop*. Fakultas Peternakan. Universitas Padjadjaran. Bandung.
- Horton and Hunt. 1984. Sociology. New York. McGraw Hill.
- Merton R. K. 1979. Social theory and social structure. New York America Publishing.
- Munandar Sulaeman. 2004. Metode penelitian sosial pendekatan kualitatif. Universitas Padjadjaran. Bandung.
- Peraturan Pemerintah No. 44. 1997. Kemitraan.
- Saragih, Bungaran dan Y.B. Krisnamurti. 1992. Pengembangan agribisnis kecil. Institut Pertanian Bogor. Bogor.